

BAB III

MASALAH-MASALAH YANG TERJADI SETELAH DANONE AQUA MASUK KE POLANHARJO, KLATEN

A. PERMASALAHAN PADA TAHUN 2004

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan sangat sulit bagi sebuah perusahaan untuk dapat masuk ke dalam suatu daerah apabila perusahaan tersebut tidak mendapatkan izin dari masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pada kasus yang terjadi di pabrik Danone Aqua di Polanharjo, Klaten, masyarakat masih belum dapat menerima kehadiran perusahaan multinasional ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Dari situlah memicu terjadinya unjuk rasa atau aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Danone Aqua.

Tahun 2004 adalah tahun dimana pabrik Danone Aqua baru dua tahun beraktivitas di Polanharjo, Klaten. pada kisaran waktu sejak pabrik Danone Aqua berjalan hingga sekitar tahun 2004 ini isu-isu protes masih berisikan tentang penolakan kehadiran dari Danone Aqua yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para petani. Para petani bahkan sampai melakukan aksi long march dari Alun-Alun Klaten hingga Gedung DPRD. Para petani ini juga bergabung kedalam Koalisi Rakyat Klaten untuk Keadilan (KRAKED) guna meminta ditutupnya pabrik Danone Aqua yang sudah beroperasi selama dua tahun itu. Alasan para petani tersebut melakukan unjuk rasa adalah karena berkurangnya debit air untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Disebutkan pada saat itu bahwa berkurangnya banyak air tidak hanya terjadi saat musim kemarau saja, bahkan saat musim penghujan pun air yang biasa melimpah juga

berkurang atau bahkan habis (Tempo, home: bisnis, 2004).

Para petani yang melakukan aksi unjuk rasa tidak hanya berasal dari Kematan Polanharjo saja tetapi juga ada dari Kecamatan Ceper, Pedan, Wonosari, Juwiring, Karangnom, dan beberapa kecamatan lain. Para petani juga mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh Danone Aqua kepada Pemerintah Daerah saat itu hanya 3 juta rupiah setiap tahunnya tetapi malah pemerintah mengizinkan Danone Aqua mengambil air yang dimiliki oleh masyarakat Klaten hingga para petani sering sekali mengalami gagal panen. Apalagi bila dilihat air yang diambil oleh Danone Aqua setiap bulannya mencapai 30 m^3 - 40 m^3 yang bisa dikira-kira keuntungan yang didapat berkisar 3 milyar hingga 4 milyar rupiah. Hal ini rupanya membuat para petani dari berbagai daerah di Klaten geram dan meminta agar perusahaan atau pabrik Danone Aqua yang beroperasi di Polanharjo, Klaten di tutup dan tidak menerima lagi masuknya perusahaan yang bekerja di bidang Air Minum Dalam kemasan (AMDK) (Tempo, home: bisnis, 2004).

B. PERMASALAHAN PADA TAHUN 2005

Pada tahun 2005 ini permasalahan yang terjadi adalah antara Pemerintah Daerah Klaten dan Danone Aqua. Titik pokok masalah yang terjadi ada pada Pemerintah Daerah Klaten yang mulai menganalisis bahwa selama tiga tahun Danone Aqua beraktivitas mengambil air yang ada di Klaten, Danone Aqua tidak pernah menyertakan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan salah satu syarat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Klaten dalam pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antar kedua belah pihak. Kenyataannya selama tiga tahun beroperasi perusahaan sebesar Danone Aqua hanya mengantongi ijin Usaha Kelola Lingkungan (UKL) atau Usaha

Pemantauan Lingkungan (UPL) (Tempo, bisnis, 2005).

Pada saat itu, pihak perusahaan menanggapi bahwa perusahaanya memang tidak wajib menyertakan AMDAL karena air yang diambil oleh Danone Aqua masih dibawah 50 liter perdetik atau tepatnya sebanyak 23,4 liter air perdetik. Meskipun begitu penyertaan dokumen AMDAL telah menjadi salah satu syarat perjanjian MoU antara perusahaan dan pemerintah. Hal ini membuat Danone Aqua dikecam oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten bahkan Bupati Klaten pada saat itu yaitu Haryanto Wibowo. Haryanto Wibowo kala itu mengancam akan menutup Pabrik Danone Aqua di Klaten apabila Danone Aqua tidak segera menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini kemudian membuat Danone Aqua harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah guna perbaikan saluran air untuk masyarakat (Tempo, bisnis, 2005).

C. PERMASALAHAN PADA TAHUN 2012

Setelah beberapa tahun Danone Aqua dapat hidup dengan tenang, pada tahun 2012 ini kembali muncul masalah baru. Masalah ini terjadi antara perusahaan Danone Aqua dengan masyarakat Kecamatan Polanharjo, Klaten. Permasalahan tersebut membuat semua Kepala Desa yang ada di Kecamatan Polanharjo, Klaten dan juga masyarakat berbondong-bondong melakukan aksi protes atau unjuk rasa di depan pabrik Danone Aqua yang ada di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Klaten. masalah yang ditonjolkan adalah mengenai ketidakmerataan pemberian CSR. Masyarakat merasa hanya desa-desa yang terdekat dengan perusahaan lah yang mendapat manfaat dari CSR tersebut dan desa-desa yang lain tidak merasakan apa-apa.

Dengan melihat Kecamatan Polanharjo yang memiliki persebaran sebanyak 18 Desa memang akan sangat sulit untuk dapat menyatukan pendapat dengan semua desa yang ada. Disinilah tantangan berat yang haru dapat diselesaikan oleh Danone Aqua.

Pada unjuk rasa kala itu, masyarakat juga memberikan tuntutan mengenai penyerapan tenaga kerja yang tidak menyentuh seluruh desa, dampak lingkungan akibat kendaraan transportasi, dampak berkurangnya debit air guna irigasi pertanian yang dirasakan oleh masyarakat Polanharjo dibagian selatan, kepedulian pabrik terhadap lingkungan yang dirasa masyarakat masih minim dan keterbukaan dari Danone Aqua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengenai retribusi yang seharusnya dikembalikan untuk Kecamatan Polanharjo (Iskandar, 2012).

D. PERMASALAHAN PADA TAHUN 2013 DAN 2014

Setelah permasalahan CSR pada tahun 2012, ternyata unjuk rasa yang dilakukan kepada perusahaan atau Pabrik Danone Aqua yang beroperasi di Klaten masih terus berlanjut. Antara tahun 2013 dan tahun 2014 ada beberapa masalah yang terjadi antara masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dan juga Perusahaan Danone Aqua.

Masalah yang pertama adalah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat yang berkumpul kemudian memberi diri mereka nama AMGA (Aliansi Masyarakat Gugat Aqua). Unjuk rasa yang terjadi kala itu bermaksud untuk melakukan protes terkait adanya kerusakan jalan yang sangat membahayakan masyarakat yang diakibatkan oleh truk-truk pengangkut hasil produksi yang kelebihan muatan yang dimiliki oleh Danone Aqua. Kemudian, menanggapi aksi protes yang terus

bermunculan, Dinas Perhubungan (DisHub) Kabupaten Klaten mengancam akan melakukan pemblokiran jalan kepada truk-truk yang dimiliki oleh Perusahaan Danone Aqua. Perwakilan dari Dinas Perhubungan juga mengatakan bahwa Danone Aqua melakukan pelanggaran terus menerus yang padahal sudah diberi peringatan berkali-kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelanggaran kelas jalan yang dilakukan oleh Danone Aqua dirasa memang sudah kelewatan, karena pada jalur kelas 3C hanya truk yang bermuatan maksimal 8 ton saja yang dapat melewatinya, tetapi kenyataannya bisa sampai 27 ton muatan satu truk yang melewati jalur tersebut (Cara, 2014).

Gambar 3.1 Unjuk Rasa Masyarakat terkait Jalan Rusak Akibat Truk Danone Aqua



Sumber: <http://www.solopos.com/2014/09/16/konflik-aqua-klaten-dishub-ancam-tutup-jalan-ke-pabrik-tirta-investama-536484>

Tidak selesai sampai disitu, kemudian muncul pula sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri mereka AMPAQ (Aliansi Masyarakat Pendukung

Aqua). Sekelompok masyarakat yang bergabung dalam AMPAQ ini mencoba untuk melawan AMGA, karena menurut mereka kehadiran perusahaan Danone Aqua sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mereka juga beranggapan bahwa AMGA memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang memiliki perbedaan visi dengan perusahaan Danone Aqua sehingga mereka melakukan unjuk rasa untuk menggugat kehadiran Aqua. Hal ini dapat dilihat menjadi perselisihan antar masyarakat Klaten sendiri. Kehadiran Danone Aqua di Klaten pada saat itu sudah memasuki tahap menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaannya. Hal ini dapat dikatakan sebagai masalah yang besar karena Danone Aqua sudah menimbulkan masalah antar masyarakat yang kedepannya tidak akan menjadi baik apabila hal ini tidak dapat terselesaikan. Hal ini juga sangat mengancam keberadaan Danone Aqua di Polanharjo, Klaten (SoloposTV, 2014).

Gambar 3.2 Unjuk Rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat AMGA



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Lnl6qBHVjEs>

E. PERMASALAHAN PADA TAHUN 2015

Pada tahun ini isu kekeringan yang terjadi di Hilir sedang menuncak. Menurut masyarakat pada saat itu, setelah Dnone Aqua masuk ke Polanharjo, Klaten, air yang biasanya melimpah malah terasa menjadi kurang. Seperti yang sudah dijeaskan, masyarakat sekitar masih menganut “Pari, Pari, Pantun” jadi meskipun saat Musim Kemarau, masyarakat tetap ingin menanam padi. Setelah masuknya Danone Aqua masyarakat sudah tidak bisa menanam padi di segala musim karena kendala air. pada daerah Hilir, air yang digunakan oleh para petani guna keperluan irigasi hanya berasal dari satu sumber sehingga hal ini sangat mengganggu pekerjaan para petani. Tidak hanya di daerah Hilir, debit sumur masyarakat yang jaraknya dekat dengan perusahaan Aqua Danone mengalami kekeringan yang mengakibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus membeli air dari tangki dengan harga yang tidak murah. Hal ini tentu saja mengakibatkan protes dari masyarakat. (Zain, Collaboration Strategy dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Aqua Danone Klaten, 2015).